

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Membicarakan dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan sungguh sangat penting dan menarik perhatian. Hal ini dikarenakan masalah pendidikan adalah masalah yang menyangkut hajat hidup manusia yang mendasar. Melalui pendidikan inilah manusia akan tercerahkan dan terbebas dari kebodohan. Di samping itu juga melalui pendidikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan manusia peserta didik nanti di kelak kemudian hari. Oleh karena itu, segala hal ikhwal terkait pendidikan ini membutuhkan suatu kinerja yang baik dari semua pihak yang terlibat, baik masyarakat, dewan guru, peserta didik dan terutama para pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang menangani masalah pendidikan.

Mengingat masalah yang menyangkut sistem pendidikan ini sangat luas, maka dalam mengkaji atau menelitinya juga harus komprehensif. Akan tetapi, bukan berarti masalah yang demikian itu tidak dapat dikaji sub-sub unitnya. Misalnya, dalam satu unit pendidikan itu pasti terdiri dari guru, murid, gedung sekolah beserta kelengkapannya dan juga institusi atau lembaga yang menaunginya yang dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dengan struktur dan hirarkhi organisasinya hingga ke tingkat Kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka salah satu komponen yang menarik untuk didiskusikan dan dikaji adalah tentang keberadaan guru. Masalah guru ini penting karena salah satu penentu penting kualitas pendidikan itu ditentukan

oleh kompetensi dan kualitas guru. Berkaitan dengan guru ini juga perlu ditekankan di sini adalah bahwa tidak juga arif dan adil jika semuanya hanya dibebankan atau disalahkan pada guru secara personal sementara kerja guru itu berada dalam suatu sistem pendidikan yang kompleks dan penuh dinamika yang menyaputnya. Dalam konteks ini, institusi atau lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam menjamin dan melindungi masalah karir guru di sekolah-sekolah umum adalah Kementerian Pendidikan yang institusinya menyentuh hingga tingkat Kecamatan, yakni berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sehubungan dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggungjawab yang besar dalam menangani masalah pendidikan di daerahnya. Bagi keberadaan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah maka masalah jenjang karir mereka juga berkait berkelindan dengan profesionalitas mereka dalam menjalankan tugas yang itu juga ditentukan bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dalam hal pengangkatan jabatan fungsional guru. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan karir dan peningkatan kesejahteraan guru yang semuanya itu dapat memengaruhi tugas dan pokok fungsi guru di lapangan. Artinya, tidak baiknya kinerja yang dilakukan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam hal pengangkatan jabatan fungsional guru tersebut maka akan memengaruhi kualitas guru dalam mengajar.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan serangkaian kebijakan yang berkesinambungan untuk mewujudkan lembaga pendidikan dan kualitas peserta didik dan terutama guru. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara bertanggungjawab

dalam masalah pendidikan. Amanat konstitusi itu kemudian dilakukan oleh organ pemerintah yang memiliki keabsahan atas nama negara untuk membenahi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, dalam hal ini di tingkat kabupaten adalah Dinas Pendidikan.

Mencermati kinerja Dinas Pendidikan ini sangat penting artinya karena memang lembaga pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi tanggungjawabnya adalah lembaga pendidikan yang termasuk lembaga pendidikan dasar yang akan menentukan jenjang pendidikan tingkat lanjut terutama sekali yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan fungsional guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Handayaniingrat berpendapat bahwa aparatur pemerintah merupakan ujung tombak pelaksanaan publik yang mencakup berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah<sup>1</sup>. Pelaksanaan pelayanan aparatur pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan murah kepada para guru yang akan mengurus pengangkatan jabatan fungsionalnya. Pemberian pelayanan dimaksud adalah perwujudan kewajiban aparatur sebagai abdi masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila aparatur pemerintah yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan dapat mengerti dan menghayati serta berkeinginan melakukan pelayanan kepada para guru demi peningkatan

---

<sup>1</sup> Soewarno, Handayaniingrat.1991.*Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta:Gunung Agung.hal:17.

kualitas pendidikan di satu sisi, dan juga peningkatan kesejahteraan mereka di sisi yang lain.

Namun demikian, ada banyak dinamika dan problematika yang melingkupi permasalahan tersebut. Dalam banyak kasus, otonomnya pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di daerahnya juga banyak yang mengalami hambatan, baik secara struktural maupun oleh hal-hal teknis lainnya di luar persoalan teknis masalah pendidikan itu sendiri. Namun penelitian ini tetaplah difokuskan pada masalah pengangkatan jabatan fungsional guru oleh Dinas Pendidikan di kabupaten yang berjuduk Sebimbing Sekundang ini. Permasalahan ini menarik mengingat lembaga pendidikan di kabupaten ini bertumbuh dengan baik mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sekedar informasi saja, walau pun penelitian ini tidak terfokus ke sana, bahwa perguruan tinggi berupa universitas di tingkat kabupaten di Sumatera Selatan pertama kali adanya justru dimulai di kabupaten Ogan Komering Ulu. Oleh karena itu, meneliti masalah kebijakan pendidikan di kabupaten ini menjadi menarik. Hal inilah yang menyebabkan penulis menjadikan Dinas Pendidikan menjadi objek penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono,<sup>2</sup> rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sedangkan menurut Burhan Bungin rumusan masalah umumnya dirumuskan dengan kalimat bertanya dan diformulasikan dalam kalimat-kalimat yang jelas, sejelas

---

<sup>2</sup> Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung. Alfabeta. Hal. 35

mungkin agar variabel-variabel penelitian maupun hubungan antar variabel itu terlihat dengan mudah dan tidak menimbulkan interpretasi lain dari rumusan tersebut.

Masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara yang diharapkan dan yang terjadi dilapangan.<sup>3</sup> Masalah juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.<sup>4</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengangkatan jabatan fungsional guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu hal yang ingin diperoleh/dicapai setelah penelitian selesai.<sup>5</sup> Menurut Sutrisno Hadi,<sup>6</sup> tujuan penelitian adalah menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengangkatan jabatan fungsional guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta. Hal : 96

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong. 2012. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal: 93

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto. Op.Cit.. Hal 97

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi. 2012. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Hal. 57

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat adalah suatu kegunaan. Manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap isntitusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>

Menurut Sutrisno Hadi,<sup>8</sup> ada dua macam manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis/ Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kinerja instansi pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Manfaaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta informasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten OKU, para guru dan siapapun yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Bumi Sebimbing Sekundang.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 99

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 57